FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA KAB OKU TIMUR

SKRIPSI

Disusun oleh:

Hidiah Siti Juariah

Nim 20312256

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA KAB OKU TIMUR

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Akuntansi Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan ekonomika UII

Oleh:

Hidiah Siti Juariah

20312256

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan demikian, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung pendapat atau tulisan yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di universitas. Selain itu, sejauh yang saya ketahui, tidak ada pendapat atau tulisan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. kecuali yang disebutkan secara eksplisit dalam naskah ini dan tercantum dalam referensi. Saya siap menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini salah."



Yogyakarta,

~~Hidiah~~ siti juariah

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA KAB OKU TIMUR

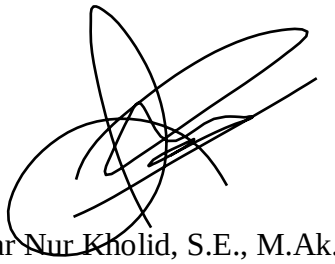
SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Hidiah Siti Juariah
20312256

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal…….

Dosen Pembimbing,



(Muamar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Ak., CA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belitang Madang Raya Kab Oku Timur".** Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk program Strata Satu (S-1) Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia . Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1) Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.S.c., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2) Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Universitas Islam Indonesia.
3) Bapak Rifqi Muhammad SE. M.Sc. PhD., SAS., ASPM selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4) Bapak Muamar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan asahan dalam penyusunan skripsi ini.
5) Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Islam Indonesia.
6) Kepada kedua orang tua saya, Bapak Jumari dan Ibu Sunarti orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang

dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Yang telah memberikan semangat, dukungan material dan mendoakan serta keikhlasan demi pendidikan anaknya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sehat selalu dan semoga kalian dalam lindungan Allah dan dilimpahkan kebaikan dan kemudahan aamiin.

7) serta kakak Ariansyah Perdana dan adik tercinta Aqila Indah Larasati atas segala semangat, pengorbanan, dukungan, serta doa restu, Semoga Allah menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
8) Kepada cinta kasih suami Edwin Satria dan anak saya Daffa Adzriel Satria. Terima kasih atas segala doa, usaha, motivasi yang telah diberikan
9) Semua teman seangkatan Akuntansi atas perjuangan dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
10) Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
11) Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

Penulis,

Hidiah Siti Juariah

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **Error! Bookmark not defined.**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR LAMPIRAN x

ABSTRAK..... xii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

a.Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 7

b.Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa? 7

c. Apakah sistem pengendlian internal (SPI) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1. Menguji pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 7

2. Menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 7

3. Menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori tentang semua elemen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 7

1.5 Sistematika Pembahasan 8

BAB II 10

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 10
2.1 Telaah Teori..... 10
2.1.1 Teori *Stewardship* 10
2.1.2 Teori Keagenan (Agency Teory)..... 11
2.1.3 Kompetensi Aparatur 12
2.1.4 Partisipasi masyarakat..... 13
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal (SPI) 13
2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 14
2.3 Perumusan Hipotesis 24
2.3.1 Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa..... 24
2.3.2 Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 25
2.3.3 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 26
2.4 Kerangka Penelitian 27
METODE PENELITAN 28
3.1 Jenis Penelitian..... 28
3.2 Populasi dan Sampel 28
3.3 Sumber dan Jenis Data 28
3.4 Metode Pengumpulan data 29
3.5 Variabel Penelitian 29
3.5.1 Variabel Dependen 29
a. Akuntabilitas pengelolaan dana desa..... 29
3.5.2 Variabel Independen 30
3.6 Teknis Analisa Data 34
3.6.1 Analisis Deskriptif 34
3.6.2 Analisis Structural Equation Modeling (SEM) 35
3.6.3 Partial Least Squere (PLS) 35
3.6.4 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 36
3.6.5 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 37

BAB IV 38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 38
4.2 Profil Responden 39
4.2.1 Jenis Kelamin 39
4.2.2 Tingkat Pendidikan 40
4.2.3 Jabatan 41
4.2.4 Usia Responden 41
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 42
4.4 Hasil Analisis Data 47
4.4.1 Uji Partial Least Square 48
4.4.2 Outter Model 49
4.4.3 Inner Model 52
4.4.4 Uji Hipotesis 54
4.5 Pembahasan 56
4.5.1 Kompetensi Aparatur Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 56
4.5.3 Sistem Pengendalian Intern Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 59
PENUTUP 61
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Saran 61
5.3 Keterbatasan dan Implikasi Penelitian 62
5.3.1 Keterbatasan 62
5.3.2 Implikasi Penelitian 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 27

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa kecamatan Belitang madang Raya 5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 14
Tabel 3.1 Pernyataan Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 30
Tabel 3.2 Pernyataan Indikator Kompetensi Aparatur 32
Tabel 3.3 Pernyataan Indikator Partisipasi Masyarakat 33
Tabel 3.4 Pernyataan Indikator Sistem Pengendalian Internal 34
Table 4.1 Jenis Kelamin 40
Table 4.2 Pendidikan Responden 40
Tabel 4.3 Jabatan 41
Table 4.4 Usia Responden 42
Tabel 4.5 Skala *Likert* 43
Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif 43
Tabel 4.7 Pengujian Outer Loading 47
Tabel 4.8 Uji *Convergent Validity* 49
Tabel 4.9 Uji *Composite Reliability* 50
Tabel 4.10 Uji Discriminant 51
Tabel 4.11 Uji *Cronbach Alpha* 52
Tabel 4.12 Uji Nilai *R-Square* 53
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis 54

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat izin FBE UII 69
Lampiran 2. Format Kuesioner 70
Lampiran 3. Daftar Pernyataan 71
Lampiran 4.Tabulasi Data Penelitian 77
Lampiran 5. Klasifikasi Data 85
Lampiran 6. Analisis Data SPSS 89
Lampiran 7. Lampiran Gambar 95

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan belitang madang raya kab oku timur. Tujuan peneliian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, pasrtisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan penyebaran kuisioner dengan jumlah 44 responden yang merupakan perangkat desa dan masyarakat setempat dengan minimal pendidikan sma. Alat uji analisis yang digunakan adalah SMartPLS v.3.0 dengan metode analisis SEM *(Structural Equation Modeling*). Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan belitang madang raya kab oku timur, Partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan belitang madang raya kab oku timur.

Kata Kunci: *Kompetensi Aparatur, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal (SPI)*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal sistem pemerintahan, desa sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah unit masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Diharapkan bahwa undang-undang pada akhirnya akan membiarkan desa berkembang. Desa memainkan peran penting dalam perangkat desa setempat dalam melakukan tugas pelayanan publik. Untuk meningkatkan otonomi desa dan meningkatkan kemandirian mereka, diperlukan desentralisasi kewenangan yang jauh lebih besar, serta pembiayaan dan bantuan yang memadai untuk sarana dan prasarana (Indra (2020).

Pahlawan et al., (2020) Menyatakan bahwa setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, desa memiliki otoritas untuk mengontrol dan mengembangkan wilayah mereka sendiri. Kebijakan pengeluaran yang besar memiliki konsekuensi dari manajemennya, yang seharusnya dilakukan secara profesional, efisien, efektif, dan akuntabel. Karena dana yang diterima oleh desa sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya, peran perangkat desa diperlukan untuk membantu kepala desa mengelola dana tersebut.

Aparatur desa yang kompeten dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Karena dana desa sangat besar, aparatur desa yang kompeten dan sistem pengendalian internal yang baik sangat penting untuk mengelolanya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset Negara, dan ketaatan terhadap Undang-Undang (Aprilya & Fitria, 2020).

Menurut Pahlawan *et al*,. (2020) Karena banyaknya program kerja desa, aparatur desa memerlukan partisipasi masyarakat dalam membantu aparatur desa mengelola dana dengan baik. Secara ideal, aparatur desa harus memberikan informasi tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa, dan masyarakat harus berpartisipasi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat mereka yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Desa memiliki unsur penyelenggara, yaitu pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan anggota staf lainnya. dalam bentuk rekomendasi dan rekomendasi untuk penggunaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat dapat berkurang. Salah satu tanggung jawab aparatur desa adalah mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah. untuk pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Bagi aparatur desa, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan fokus utama karena menunjukkan tanggung jawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana tersebut.

Pengelolaan sumber daya desa memerlukan dukungansumber daya manusia yang baik dan peralatan TI yang memadai. Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas di kemudian hari, pengelola dana desa harus memiliki kemampuan yang diperlukan. Anggaran APBN yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia. Aparatur desa dapat meningkatkan kompetensinya dengan terus melakukan pelatihan pada jenjang yang lebih tinggi. disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur desa yang kompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) Kajian ini menyatakan perlunya keseimbangan antara akuntabilitas dan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran, karena kapasitas yang tepat akan mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Mengelola dana desa tidak hanya memerlukan kemampuan yang baik namun juga sistem pengelolaan internal. Sistem Pengendalian Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan suatu proses yang merupakan bagian integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh pegawai secara berkelanjutan untuk menjamin pengendalian yang tepat atas pencapaian rencana. Adanya sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al,. (2020) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memengaruhi akuntabilitas dana desa dengan cara yang positif. Menurut Pahlawan et al. (2020), tidak ada dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh sistem pengendalian internal. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Atiningsi & Ningtyas (2019) menemukan bahwa dampak sistem pengendalian internal positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat juga memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Untuk mendorong pembangunan di wilayah desa, masyarakat harus berperan dalam menggali potensi desa dalam mengelola dana desa. Desa yang menerima dana dari Dana Desa akan mendapatkan manfaat dari program yang dilakukan oleh masyarakat. Ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019). Menurut penelitian tersebut, partisipasi masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan dapat membantu berbagai kegiatan desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses membuat kebijakan dan anggaran pemerintah. Namun, penelitian Listyawati et al. menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa kemudahan memperoleh informasi harus diutamakan. Transparansi merupakan asas yang menjamin kebebasan setiap orang dalam mengakses atau memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Hal ini sejalan dengan penelitian Wafirotin & Septiviastuti, (2019) yang menyatakan bahwa Transparansi merupakan prinsip yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanah rakyat. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan keputusan yang penting bagi masyarakat. Artinya, ketika pemerintah menjalankan fungsinya, mereka harus mampu mengetahui dan mengkomunikasikan informasi lengkap tentang apa yang mereka lakukan.

Akuntabilitas juga dapat menunjukkan bahwa aparatur desa telah bekerja dengan benar, etis, dan bertanggung jawab atas kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, serta dapat mengurangi penggunaan atau pemanfaatan dana yang tidak tepat sasaran (Ngakil & Kaukab, (2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Faktor-faktor tersebut termasuk kemampuan aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat.

Menurut https://peraturan.bpk.go.id/Jenis/1(Ogan & Ulu, 2021) (Ogan & Ulu, 2021) Kecamatan Belitang Madang raya terdiri dari 16 desa. Dari 16 desa yang ada di kecamatan Belitang Madang Raya tersebut semua mendapat dana desa. Sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa pemerintah, faktor pemerataan dulunya sangat penting, tetapi fokus saat ini adalah keterlambatan ekonomi. Danan desa yang diberikan kepada setiap desa di Kecamatan Belitang Madang Raya digunakan untuk membangun dan meningkatkan masyarakat.

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa kecamatan Belitang madang Raya

No	Kecamatan	Besaran Dana
1	**Tugu Harum**	**393.418.802**
2	Tulus Ayu	344.965.802
3	Tugu Mulyo	296.365.802
4	Bangsa Negara	296.365.802
5	KarangBinangun	296.365.802
6	Pandan Sari I	296.365.802
7	Tanah Merah	296.352.802
8	Lubuk Harjo	272.086.402
9	KarangBinangun II	272.086.402
10	Pelita Jaya	247.820.002
11	Tebing Sari Mulya	247.820.002
12	Rantau Jaya	247.820.002
13	Yosowinangun	223.553.802
13	Jati Mulyo I	223.553.802
15	Mekar Jaya	223.553.802
16	Marga Cinta	199.287.202
	Jumlah	**4,568,430,120**

Sumber : peraturan Bupati Oku Timur nomor 3 Tahun 2023

Berdasarkan pada Tabel 1.1 Di antara 16 desa di Kecamatan Belitang Madang Raya yang menerima kucuran dana desa, desa Tugu

Harum adalah yang paling banyak menerimanya. Mengingat bahwa pemerintah desa memiliki sumber daya terbesar di Kabupaten Oku Timur, mereka harus memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas saat mengelola keuangan desa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan peraturan dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemerintah.

Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) yang menggunakan seluruh variabel. berarti seluruh masyarakat berhak mengetahui proses anggaran yang mempengaruhi manfaat Dana Aspirasi Masyarakat , terutama yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik memerlukan keterbukaan, partisipasi, dan kemudahan akses masyarakat terhadap proses tata kelola. Keterbukaan dan kesederhanaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan berdampak positif terhadap penerapan indikator lainnya. Tanpa keterbukaan jaringan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan di daerah hanya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih rentan terhadap korupsi dan kurang akuntabel. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang baik dan akurat memerlukan sinergi antara keterbukaan, kejujuran dan tata kelola.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Tugu Harum karena merupakan Desa yang mendapat kucuran angaran dana paling tinggi di Kecamatan Belitang Madang Raya Perencanaan kependudukan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dasar dan pelatihan. Karena semakin banyak sumber daya yang diterima suatu desa, semakin besar pula tanggung jawab yang diembannya. Sejauh ini belum ada penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Tugu Harum, namun dana desa yang paling banyak terdapat di wilayah Belitang Madang Raya.berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan diatas maka

peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belitang Madang Raya".

1.2 Rumusan Masalah

a.Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

b.Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa?

c. Apakah sistem pengendlian internal (SPI) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori tentang semua elemen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan tinjauan praktis untuk staf dan pihak-pihak yang ada dalam pemerintah.

c. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu meningkatkan profesionalisme pegawai dan pihak-pihak yang ada dalam pemerintahan dalam membuat laporan pertanggungjawaban untuk mengungkap kasus korupsi dana desa di Indonesia.

d. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi karyawan dan pihak-pihak yang ada dalam pemerintahan yang membuat laporan kewajiban.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Alasan pemilihan judul penelitian antara lain berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori yang mendasari analisis pokok permasalahan penelitian dituangkan dalam bentuk kajian teoritis, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel,definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan denan analisis data menggunakan SmartPls versi 3.0 untuk memastikan apakah hipotesis sudah sesuai atau tidak dan menjabarkan hasil pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Menurut teori stewardship (Donaldson dan Davis, 1991), manajemen tidak selalu termotivasi untuk tujuan individu. Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan nonprofit lainnya. Organisasi sektor publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi direktur dengan direktur. Hubungan ini terdiri dari rakyat sebagai direktur dan pemerintah sebagai direktur, yang terbentuk oleh sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur, dan integritas di pihak lain (Anggrayeni et al., (2021).

Teori ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan pelanggan dan kesuksesan sebuah organisasi. Untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan, sebuah organisasi dapat memaksimalkan utilitas pimpinannya. dan pengawasan. Teori stewardship dapat diterapkan untuk penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintah dan nonprofit (Haliah, 2012).

Pahlawan et al., (2020) teori stewardship dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah tetap ada sebagai organisasi yang dapat dipercaya, dapat memenuhi keinginan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang baik, dan mampu membuat tanggung jawab keuangan yang diberikan kepadanya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Teory)

Scott (2015) (dalam Indraswari & rahayu, 2021) menyatakan bahwa teori agensi mengacu pada hubungan atau perjanjian antara agen dan direktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah sama seperti hubungan antara agen dan principal, karena masyarakat berfungsi sebagai principal dan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi, melaporkan, menunjukkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, masyarakat memberikan wewenang pengaturan dan pengelolaan kepada agen, serta menghasilkan pendapatan melalui pajak dan lainnya. Pemerintah daerah harus memberikan laporan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas wewenang yang diberikan.

Menurut Hariani et al., (2022) Dalam beberapa kasus, teori keagenan menunjukkan konflik antara prinsipal dan agen tentang asimetri informasi; salah satu contohnya adalah ketika agen memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan sehingga mereka lebih cenderung untuk mengubah laporan keuangan perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri. Seorang prinsipal atau pemberi amanah memberikan kepercayaan kepada pemerintah atau agen untuk mengelola alokasi dana desa karena hubungan teori agensi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintahan daerah di Indonesia telah menerapkan teori agensi, entah secara sadar atau tidak. Orang-orang adalah prinsipal organisasi sektor publik, dan pemerintah adalah agen, seperti kepala desa dan staf desa lainnya.

2.1.3 Kompetensi Aparatur

Karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan disebut kompetensi (Hevesi, 2005). Atiningsih & Ningtyas, (2019) Beberapa ahli percaya, Karakteristik yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya disebut kompetensi. Pekerja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan menyebabkan pekerjaan yang tidak efisien, yang menghabiskan bahan, waktu, dan tenaga.

Skill, menurut *Dunnetts* dalam anonim, adalah kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang muncul dari pengalaman dan pelatihan. Menurut Blanchard & Thacker (2004) dalam anonim, kemampuan Seberapa baik seseorang dalam melakukan hal-hal tertentu, seperti menjalankan peralatan, berkomunikasi dengan baik, atau menerapkan strategi bisnis.

Atiningsih & Ningtyas, (2019) menyatakan Proses pengendalian kualitas memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atas transaksi, dan sumber daya manusia yang dilatih khusus untuk tugas ini harus mematuhi standar akuntansi yang relevan untuk pembukuan. Mereka harus dapat melayani banyak desa di tingkat regional, misalnya di tingkat provinsi atau kabupaten, karena mereka memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Selain itu, UU No.6/2014 Bab XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan mengatur fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa. Fungsi pengawasan ini, terutama pada pasal 115 ayat (g), mengatur bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Dengan demikian, pekerjaan teknis ini dapat dilaksanakan secara bersamaan. Kontrol kualitas dalam profesi akuntan publik mirip dengan pekerjaan jasa akuntansi: kompilasi dan review yang diatur dalam

2.1.4 Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti bahwa orang-orang di masyarakat terlibat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi masalah yang terjadi pada masyarakat, memilih dan mencari solusi terbaik untuk menangani masalah, berusaha untuk menyelesaikan masalah, dan menilai perubahan yang terjadi (Budiarto et al., 2020).

Utami dan Sofyan, 2013 (dalam Indraswari & rahayu, 2021) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, dan bahwa partisipasi tersebut akan berdampak pada bagaimana kinerja pemerintah dievaluasi dan dikendalikan. Untuk keuangan yang efektif, juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau kritikan terhadap proses penyusunan dan pembuatan kebijakan. Sementara itu, partisipasi masyarakat didefinisikan oleh Isbandi, 2007 (dalam Nuzula, 2020:29) sebagai keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses, seperti menemukan masalah dan kemungkinan solusi untuk masalah tersebut, membuat keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut, dan menilai perubahan yang terjadi. mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang dalam upaya menciptakan pengelolaan.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sejumlah tindakan yang diambil untuk melindungi aset dan keuangan sebuah organisasi dari ancaman dari luar dikenal sebagai pengendalian internal. jenis tindakan pencegahan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat, dan memastikan bahwa kebijakan dan peraturan manajemen telah dipatuhi dan diterapkan dengan benar (Hery, 2014:11-12). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh di kedua pemerintahan pusat dan daerah akibatnya, akuntabilitas tidak akan tercapai secara optimal (Wahyuning et

al,. (2020).Penemuan ini sejalan dengan temuan yang dibuat oleh Budiana et al. (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), dan Aulia et al. (2018), yang menemukan bahwa kedua kemampuan aparatur desa dan kemampuan aparatur pengelolaan dana desa mempengaruhi akuntabilitas dana desa.

2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Atiningsih & Ningtyas, (2019) Akuntabilitas berarti memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau bertanggung jawab untuk meminta keterangan atau tanggung jawab.

Akuntabilitas meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dengan menekankan pertanggungjawaban yang lebih luas kepada masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (2000), akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada pihak yang berhak atau yang berwenang atas tindakan dan kinerja seseorang atau pemimpin unit dalam organisasi. Semakin baik sistem akuntansi yang digunakan dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan, akurat, dan tepat waktu, semakin tinggi akuntabilitasnya, Lestari et al., 2014 (dalam Kartika dan Astri, 2020).

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama pengarang dan tahun	Nama Variabel	Objek kajian/ responden	Temuan kajian
1	Ulfah Andiani &	Variabel	Penelitian dilakukan	Peran perangkat desa

	Tatik Zulaikha (2019)	independen: peran perangkat desa Variabel dependen: Akuntabilitas Pengelolaan dana desa	di Desa Batu raya 1 kec gunung timang dengan melibatkan kepala desa, Bendahara, Sekertaris dan staf desa	sudah berperan dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah terlaksana dengan baik secara keseluruhan.
2	Suci Atiningsih & Aulia Cahya Ningtyas (2019)	Variabel Independen: Kompetensi Aparatur Pengelola dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Penelitian dilakukan di se kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan melibatkan aparatur pemerintah desa guna untuk melakukan pengumpulan data melalui kuesioner dilengkapi dengan wawancara.	Kompetensi aparatur pengelola dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan

				terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Khusnatul z & Umi Septiviastuti (2019)	Variabel Independen: Transparansi, Partisipasi masyarakat, Akuntabilitas Variabel Dependen: Pengelolaan dana desa	Penelitian itu dilakukan pada desa di Kecamatan Pulung dan Ngebel, Ponorogo. Populasi penelitian ini adalah Kepala Desa, Desa Sekretaris, Bendahara Desa, Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketua dari BPD. teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden	transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.
4	Selvia mega (2020)	Variabel independen: Partisipasi, Pemahaman, dan Peran perangkat desa Variabel	Penelitian dilakukan di desa-desa di kecamatan Sentolo dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat guna untuk mengisi kuesioner yang	Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemahaman

		Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	disebarkan ke seluruh perangkat desa di kecamatan sentolo	perangkat desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran perangkat desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	Ibnu Ngakil & M. Elvan (2020)	Variabel Independen: Transparansi pengelolaan keuangan desa Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas pengelola keuangan desa di kabupaten wonosobo, dengan sasaran penelitian yaitu masyarakat yang tinggal di 9 desa di Wonosobo	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah dikelola secara optimal sesuai ketentuan dan dalam kategori baik.
5	Enni Safitri, Andreas & Volta Diyanto (2020)	Variabel Independen: Kepemimpinan Internal, Sistem pengendalian,	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan,	sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap transparansi dan

		Organisasi Komitmen Akuntabilitas. Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa	sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampar dan Kabupaten Siak. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner- nares dibagikan langsung kepada responden.	akuntabilitas aset tetap pemerintah. kecerdasan spiritual dan kepemimpinan asta brata berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, dan hubungan tersebut dimediasi oleh budaya organisasi Tri Hita Karana.
7	R. Budi Hendaris & Rahmat Siraz (2020)	Variabel Independen: Faktor-faktor yang mempengaruhi. Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kompetensi sumber daya manusia, penyelenggaraan desa sistem keuangan, dan pelaksanaan internal sistem kontrol pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. dengan	manusia kompetensi sumber daya, implementasi sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

			menggunakan survei menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. desa di wilayah Barat Kabupaten Bandung.	
8	Fannidya, Ardian, Dkk (2020)	Variabel Independen: Kolaborasi pemangku kepentingan. Variabel Dependen:Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana dan Pembangunan Pedesaan	Objek penelitiannya adalah perangkat desa di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur	pemerintah desa belum optimal menjalankan perannya dalam melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengelola desa pendanaan melibatkan aparat pemerintah desa, tim pengelola kegiatan dan masyarakat. Mereka berperan positif dalam mewujudkan akuntabilitas desa mengelola dana desa.
9	Dwi Fitri P. & Riky Agung P (2020)	Variabel independen: Kompetensi	Objek dari penelitian ini adalah kepala desa dan bendahara	kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh

		Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	desa se-Kota Pariaman	terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
10	Dekeng Setyo, Agesti Dwi & ratna Purnama Sari (2020)	Variabel Independen:Faktor-faktor Anteseden. Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul.	kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

11	Enggar wahyuning, Anita wijayanti dan Suhendro (2020)	variabel independen : kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat. Variabel independen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas perangkat desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa. Subjek penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.	Kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa, namun sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan menikmati tanggung jawab pengelolaan dana desa.
12	Siti Nurhayati (2020)	Variabel Independen: Faktor-faktor yang mempengaruhi. Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana tingkat desa di desa Indralaya, Sudimampir, dan Penyandingan.	Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan jelas terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan peran perangkat desa berpengaruh positif dan jelas terhadap akuntabilitas

				pengelolaan penyaluran Alokasi dana desa dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan. dampak. pengaruh terhadap akuntabilitas Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat tidak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa.
13	Zulkifli, Sandrayati & Neni Ariani (2021)	Variabel independen: kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kapasitas perangkat desa, sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Populasi dalam penelitian ini adalah	Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen

		Variabel Dependen:Akuntabilitas pengelolaan dana desa	perangkat desa sebanyak 4.444 orang yang tersebar di 10 desa di kabupaten Muara Enim atau setara dengan 70 orang.	organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
14	Kristiyanti (2021)	Variabel Independen: Penerapan Good Corporate Governance, Kinerja aparatur desa, Budaya organisasi. Variabel dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Objek penelitian ini dilakukan pada 18 Kantor Desa di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner	tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kinerja perangkat desa dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa
15	Chintya & Swarmilah (2021)	Variabel Independen: Akuntabilitas, pengawasan, dan Transparansi Variabel dependen:	Penelitian ini bertujua untuk mengetahu pengaruh akuntabilitas transparansi, da pengawasan terhada pengelolaan dana desa Objek penelitian in ada 10 desa yan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan

		Pengelolaan dana desa	terletak di Kecamata Kaloran Kabupate Temanggung.	pengawasan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Menurut (Aprilya & Fitria, 2020), Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas adalah kompetensi; untuk meningkatkan akuntabilitas, kompetensi diperlukan. Kompetensi, menurut Hevesi (2005), adalah atribut yang dimiliki seseorang yang terdiri dari pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skills). dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan, latar belakang pendidikan, dan pelatihan dapat digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi seseorang. Sumber daya manusia sangat penting untuk menyelesaikan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Menurut Mathis dan Jacson (2002), nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tugas dengan sebaik mungkin, tanpa mempertimbangkan latar belakang. Aparatur pemerintah harus memiliki hal-hal di atas agar memiliki memiliki sumber daya yang tepat dan berkualitas tinggi untuk mengelola dana desa sehingga sesuai dengan tanggung jawabnya

Menurut Umaira & Adnan, 2019 Segala hal yang berkaitan dengan dana desa, sumber daya manusia yang kuat sangat penting untuk pengelolaan keuangan desa, serta tanggung jawabnya. Jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, tentu saja akuntabilitas akan menurun. Oleh karena itu,

akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia.

Menurut teori stewardship, ketika salah satu atau lebih pimpinan mempekerjakan seorang pimpinan untuk menyediakan jasa tertentu, hubungan antara pimpinan dan pimpinan muncul. mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer. Di sini, hubungan antara manajer dan direktur akan menjadi satu arah dan seimbang karena manajer percaya bahwa manajer akan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi daripada tujuan pribadi mereka sendiri. Keterlibatan akan meningkatkan kepercayaan dan keberanian pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. sehingga semua operasi dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini didukung oleh penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019), Fitri & Prasetyo, (2020), dan (Zulkifli et al., 2021) menunjukkan Jika benar bahwa kemampuan aparatur pemerintah desa berdampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka hipotesis berikut dapat diturunkan:

H1: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

2.3.2 Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat adalah dengan meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin dan membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. pertanggungjawaban, keterlibatan dimulai dari evaluasi hingga pelaporan (Ebrahim, 2003) (dalam Indra, 2020). Partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat terlibat dalam proses menemukan masalah dan peluang mereka serta membuat membuat keputusan tentang solusi alternatif, menerapkan solusi, dan melibatkan masyarakat dalam menilai perubahan.

Dalam teori *stewardship, principals* Pemerintah dan masyarakat yang percaya bahwa direktur atau perangkat desa melakukan tugasnya

dengan benar disebut sebagai direktur dalam teori stewardship. Dalam situasi ini Masyarakat mempercayakan penuh pada perangkat desa, yang akan melakukan tugas sebagaimana mestinya dan fokus pada keberhasilan tujuan organisasi. Untuk mencapai akuntabilitas, partisipasi masyarakat juga diperlukan. Dana yang dikumpulkan dikelola oleh masyarakat. berdasarkan pada pengelolaan keuangan desa yang terlibat, akuntabel, tertib, dan disiplin dengan partisipasi publik dalam manajemennya.

Hasil penelitian Umaira & Adnan (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019), dan Budiarto et al. (2020) menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil pernyataan dan hipotesis, partisipasi masyarakat berdampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa:

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.3.3 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menetapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai prosedur penting untuk tindakan dan kegiatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Aparat Pengawas Instansi Pemerintah adalah salah satu cara untuk mengajarkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP). Menurut BPKP, SPIP juga memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja pengelolaan keuangan desa.

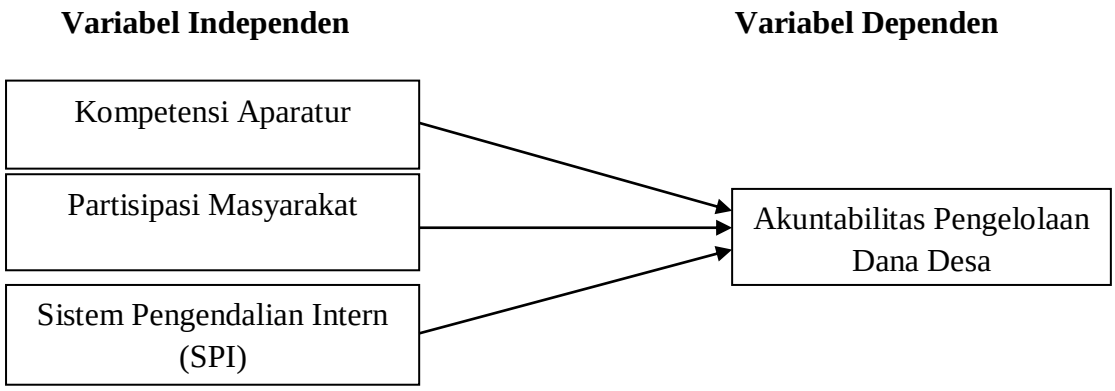
Dalam teori *Stewardship* disini *Principals* Pemerintah dan masyarakat adalah pemimpin dalam teori pengelolaan, dan pengawas adalah perangkat desa. Masih ada kebocoran saat ini dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengendalian Internal dapat memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah dapat dicapai dengan efektif dan

efisien. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal, mereka dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berdampak pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal, semakin percaya diri administrasi sumber daya desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sangat penting untuk meminimalkan kebocoran sistem (Anggrayeni et al., (2021) .

Penelitian yang dilakukan oleh Andreas & Diyanto (2020), Atiningsih & Ningtyas (2019), dan Fitri & Prasetyo (2020) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal Aparatur Pemerintah Desa berdampak positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Berdasarkan temuan ini, hipotesis berikut dapat dibuat:

H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III
METODE PENELITAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis tentang bagian dan fenomena serta hubungannya (Hardani et al., 2020; 240). Penelitian ini menggunakan data numerik dan menekankan bahwa proses penelitian berfokus pada mengukur hasil yang objektif melalui penggunaan analisis statistik. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana variabel populasi berinteraksi satu sama lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini diukur kemudian dengan skala Likert (Anggrayeni et al,. (2021). Studi ini menggunakan model equation structural (SEM) untuk menganalisis data dan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0 untuk analisis partial least square (PLS).

3.2 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2013) (dalam Aryani, (2020) mengatakan bahwa populasi adalah area atau komunitas yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sebelum mencapai kesimpulan.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian kuantitatif ini menggunakan data angka atau kualitatif yang diangkakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Sugiyono, 2008:193). Data penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Responden Studi ini melihat perangkat desa dari 16 Desa di Kecamatan Belitang Madang Raya, yang berada di Kabupaten Oku Timur. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel nya menggunakan teknik pengambilan sampel purposive, yang merupakan metode pengambilan sampel non-random, di mana peneliti menetapkan karakteristik tertentu yang

relevan dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat membantu menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini, kriteria sampel adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa, sekretariat desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra, dan operator siskeudes adalah anggota perangkat desa.
2. Tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA.

3.4 Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data awal dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab atau diisi oleh responden. Kuesioner akan didistribusikan secara langsung oleh Peneliti dan pengisian kuesioner akan dilakukan langsung oleh responden dengan member tana pada jawaban yang telah disediakan (Indraswari & rahayu, 2021).

Pengukuran dalam penelitian untuk mengukur opini responden menggunakan skala ordinal atau disebut skala likert. Skala ordinal atau skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena social yang terdiri dari 5 pengukuran. Penukuran opini responden menggunakan skala likert adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tudak Setuju(TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen

a. Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Menurut Setiyono (2014: 193) (dalam Andriani & zulaikha, 2019) Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa kebijakan, tindakan, dan tindakan institusi publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalamkonteks kepentingan publik. Tidak ada fasilitas, anggaran, atau otoritas yang dimiliki digunakan untuk kepentingan pribadi atau publik. Oleh karena itu, akuntabilitas berarti bahwa seseorang bertanggung jawab

atas cara mereka menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan organisasi dan mencegahnya disalahgunakan. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa, menurut Sande (2013). Ini termasuk perumusan rencana keuangan, pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporan keuangan. Item tersebut disusun dalam bentuk kuesioner dengan skala 1-5, dimulai dengan sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). Dengan pernyataan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pernyataan Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Kantor tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.					
2.	Kantor tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.					
3.	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kantor tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu.					
4.	Transaksi yang disajikan kantor tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					

Sumber: (Fatkhurohman, 2021)

3.5.2 Variabel Independen

A. Kompetensi Aparatur

Karena sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan, sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam organisasi dibentuk dari tahap seleksi hingga pelaksanaan tugas (Sutrisno, 2017:2). Dalam hal pengelolaan dana desa, aparatur desa harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Ini karena aparatur desa yang mahir dalam hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut (Umaira & Adnan, 2019). Pembelajaran memungkinkan seseorang memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Belajar adalah cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan. Kegiatan belajar memungkinkan orang untuk memperoleh berbagai pengertian, keterampilan, sikap, dan perilaku. Belajar adalah penting bagi sebagian masyarakat.

Dengan demikian, kompetensi dapat didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan, keahlian, dan tingkah laku yang dimiliki seseorang. Tingkat kompetensi pengetahuan dan keahlian menunjukkan karakteristik yang dimiliki seseorang lebih realistis dibandingkan dengan pandangan. Fokus adalah aspek kepribadian yang paling penting dan lebih tersembunyi. Kompetensi adalah definisi dari apa yang dilakukan di tempat kerja. Untuk masing-masing tingkat, standar tersebut dijelaskan dan dijelaskan. Mengetahui jenis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan seseorang di tempat kerja memungkinkan tugas dan tanggung jawab dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, akan mungkin untuk mencapai standar kualitas profesional (Kompri, 2017) (dalam Fitri & Prasetyo, 2020). Item kompetensi disesuaikan dengan situasi pemerintahan desa. Pertanyaan terdiri dari tujuh item, masing-masing dengan skala Likert dari 1 hingga 5. Skala ini berkisar dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). keahlian teknis, pengetahuan dasar, dan kemampuan untuk meningkatkannya adalah kompetensi aparatur yang diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Roviyantie (2012). Berikut pernyataan yang dapat di berikan adalah:

Tabel 3.2 Pernyataan Indikator Kompetensi Aparatur

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Saya telah mengerti peran dan fungsi pengelolaan keuangan pemerintah desa.					
2.	Saya telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi keuangan yang sesungguhnya.					
3.	Saya telah bekerja sesuai pedoman mengenai proses keuangan yang ada.					
4.	Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas dibidang keuangan.					

Sumber: (Aziiz & Prastiti, 2019 (dalam Fatkhurohim, 2021)

B. Partisipasi Masyarakat

Menurut Umami dan Sofyan (2013) (dalam Indraswari & Yuliastuti, 2021), partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Keterlibatan ini akan berdampak pada bagaimana kinerja pemerintah dievaluasi dan dikontrol, serta meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, masyarakat harus terlibat dalam proses penyusunan dan pembuatan kebijakan dengan memberikan kritik dan saran. Pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat ini. Item tertulis dalam bentuk survei dengan skala 1-5, dimulai dengan sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4), dan sangat tidak setuju (5).

Tabel 3.3 Pernyataan Indikator Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program penggunaan dana desa.					
2.	Masyarakat terlibat secara aktif dalam rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.					
3.	Masyarakat mengusulkan rencana anggaran alternative untuk BPD terhadap rancangan anggaran desa untuk diajukan kepada pemeritah desa.					
4.	Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa.					

(Sumber: Khaeril Wahyu P. 2018)

C. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untukmemberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara , dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan". Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (Atiningsih & Ningtyas, 2019)(Atiningsih & Ningtyas, 2019)(Atiningsih & Ningtyas, 2019)(Atiningsih & Ningtyas, 2019)(Atiningsih & Ningtyas, 2019) Atiningsih & Ningtyas, (2019). Nurmuthmainnah (2015) menyatakan bahwa lima indikator telah

digunakan untuk mengukur SPI, yang telah digunakan di berbagai pemerintahan. Lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan pengendalian internal adalah beberapa indikator. Item ini disusun sebagai kuesioner dengan skala 1-5, dimulai dengan sangat tidak setuju (1) dan tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4), dan sangat setuju (5), dengan pernyataan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pernyataan Indikator Sistem Pengendalian Internal

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas.					
2.	Adanya kejelasan tugas dan wewenang dalam pemeintah desa.					
3.	Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.					
4.	Memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi resiko pelanggaran.					

Sumber: (Aziiz & Prastiti, 2019 (dalam Fatkhurohman, 2021)

3.6 Teknis Analisa Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis nilai statistik hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan atau mengkarakterisasi data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang lebih luas. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian antara lain mean (rata-rata), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, rentang, kurtosis dan asimetri distribusi Ghozali, 2018) (dalam Fatkhurrokhim, 2021).

3.6.2 Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan persamaan permodelan *structural equation modeling (SEM).* Analisis jalur (path analysis) dan regresi berganda (multiple regression) adalah dua bentuk model analisis multivariate, dan metode SEM adalah evolusi dari keduanya. Dalam pemeriksaan yang bersifat Metode SEM, yang dapat diklasifikasikan sebagai asosiatif, multivariate-korelasional, atau kausal-efek, tampaknya menantang penggunaan analisis jalur dan regresi berganda yang telah digunakan selama beberapa dekade hingga awal tahun 2000-an. Metode SEM lebih unggul daripada analisis jalur dan regresi berganda karena dapat menganalisis data secara lebih komporehensif. Analisis jalur dan regresi berganda hanya dapat dilakukan pada skor total data. variabel, yang merupakan jumlah instrumen penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, analisis jalur dan regresi berganda hanya digunakan pada tingkat variabel laten. Namun, metode SEM melakukan analisis data pada semua skor pertanyaan instrumen variabel penelitian, yang membuatnya lebih mendalam. Dalam analisis SEM, komponen disebut variabel manifes (ditemukan), variabel indikator, atau variabel laten (Fahr, 2008)

Menurut Saputra, (2018) Hubungan kausalitas diantara variabel atau konstruk yang diamati menjadi lebih informatif, lengkap, dan akurat dengan menggunakan SEM. Dengan menggunakan SEM, tidak hanya hubungan kausalitas (langsung dan tidak langsung) pada variabel atau konstruk yang diamati, tetapi juga besarnya komponen yang berkontribusi pada pembentukan konstruksi.

3.6.3 Partial Least Squere (PLS)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. PLS adalah bagian dari metode Structural Equation Modeling (SEM), yang mengubah pendekatan dari yang berbasis kovarian menjadi yang berbasis varian.

Structural Equation Modeling (SEM) sendiri digunakan sebagai pengganti metode regresi untuk mengatasi kekurangan metode tersebut.

Partial Least Square (PLS) adalah metode analisis yang kuat karena tidak mengansumsikan data arus dengan skala tertentu; data ini dapat berupa nominal, ordinal, interval, rasio, atau kategori (gratis distribusi). Ini karena Partial Least Square (PLS) menggunakan metode penggandaan secara acak atau bootstraping, yang mana asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. PLS dapat digunakan karena sampel penelitian kecil. Oleh karena Partial Least Square termasuk dalam kategori non-parametrik, permodelan PLS tidak membutuhkan data dengan distribusi normal. Analisis Partial Least Square (PLS) terdiri dari dua submodel. Model pengukuran, atau model luar, dan model struktur, atau model dalam, masing-masing digunakan untuk menguji validitas dan reabilitas. Model struktur, atau model dalam, digunakan untuk menguji kausalitas atau hipotesis dengan model prediksi. Kedua model dapat diuji secara langsung (Alvionita, 2022).

3.6.4 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Menilai luar model adalah langkah pertama dalam SEM-PLS. Ini berkonsentrasi pada menguji reliabilitas dan validitas setiap konstruk. Nilai faktor pengisi untuk setiap indikator konstruk dapat digunakan mengevaluasi validitas convergent indikator refleksif. Namun, validitas discriminant terkait dengan prinsip bahwa variabel konstruk yang berbeda yang manifest seharusnya tidak berkolerasi dengan tinggi (temalagi & anakotta, (2021).

1. Untuk melihat *convergent validity*, Anda juga dapat melihat nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE harus lebih dari 0.5.
2. *Discriminant Validity* Akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk me nunjukkan validitas diskriminan yang baik karena korelasi antar konstruk dalam model lebih kecil daripada AVE.

3. *Cronbach Alpha*: Nilai cronbach alpha dapat digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas sebuah konstruk; jika nilainya lebih dari 0,70, konstruk dianggap reliabel.
4. *Reliabilitas Komposit*: Konstruksi dianggap reliabel jika nilainya lebih dari 0.7.

3.6.5 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Dalam teori substantif, model struktural, juga dikenal sebagai "model dalam", menggambarkan hubungan antara variabel laten. Model ini dapat dievaluasi dengan uji kuadrat GeisserQ untuk prediksi relevansi, uji t, dan nilai signifikansi koefisien parameter jalur struktural.Untuk menilai suatu model dengan PLS, pertama-tama kita melihat lingkaran R untuk setiap variabel laten dependen. Kita dapat mengetahui apakah variabel laten independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel laten dependen dengan melihat perubahan nilai lingkaran R. Selain melihat R-squre, relevansi model konstruktif harus dievaluasi melalui Q-square prediktif. Nilai observasi yang dihasilkan oleh model, serta estimasi parameternya, dinilai dengan Q-square (Sari & Hermanto, (2019). kuat, moderat dan lemah. Penelitin ini menguji hipotesisnya berdasarkan tingkat reliabilitas 90% dan batas keakuratan 0,1. Didasarkan pada dua kondisi:

1. Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai t-tabel lebih kecil dari 1,96 dan nilai t-statistik sama dengan 1,96.
2. jika nilai t-tabel lebih besar atau sama dengan 1,96, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Belitang Madang Raya adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten OKU Timur sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Belitang Madang Raya merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten OKU Timur. Nama "Belitang Madang Raya" mungkin mengacu pada wilayah atau daerah tertentu di kecamatan tersebut. Setiap kecamatan umumnya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.

Kecamatan Belitang Madang Raya terletak di bagian timur Kabupaten OKU Timur. Wilayahnya dapat berbatasan dengan kecamatan lain di kabupaten yang sama atau dengan kabupaten lain di sekitarnya, tergantung pada konfigurasi administratif yang berlaku. Kecamatan Belitang Madang Raya memiliki populasi yang terdiri dari beragam latar belakang dan profesi. Penduduknya mungkin terdiri dari berbagai suku dan agama, menciptakan keragaman budaya yang kaya. Mata pencaharian utama penduduk di kecamatan ini mungkin bervariasi, termasuk pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri lainnya. Potensi sumber daya alam di daerah tersebut juga dapat mempengaruhi perekonomian lokal.

Infrastruktur di Kecamatan Belitang Madang Raya termasuk jaringan transportasi, seperti jalan dan jembatan, serta fasilitas umum lainnya seperti sekolah, pusat kesehatan, pasar, dan tempat ibadah. Kemajuan infrastruktur biasanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika terdapat potensi pariwisata di kecamatan ini, itu mungkin mencakup objek wisata alam, sejarah, atau budaya. Destinasi wisata lokal dapat menarik wisatawan lokal maupun internasional dan berkontribusi pada pendapatan daerah. Sebagai bagian dari Kabupaten OKU Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya mungkin memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, industri, dan infrastruktur.

Visi:

"Menjadi kecamatan yang unggul, mandiri, dan berdaya saing dengan pelayanan yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera."

Misi:

a. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan industri lokal.
c. Memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
d. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
e. Melestarikan dan mempromosikan budaya lokal serta potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan dan pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan.

4.2 Profil Responden

Dari hasil pengolahan kuisioner diperoleb profil responden yang menjadi sampel penelitian ini.

4.2.1 Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin responden terdiri dari dua yaitu, pria dan wanita. Setelah kuisioner di sebarkan kepada 44 responden maka dilakukanlah identifikasi terhadap responden yang menjadi sampel sebagai berikut. Dapat dilihat pada table 4.1 berikut bahwa berdasarkan jenis kelamin maka responden di dominasi oleh laki-laki 34 orang atau 77,3% sedangkan wanita 10 orang atau 22,7% . profil responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table 4.1.

Table 4.1 Jenis Kelamin

Jenis kelamin	***Jumlah***	***Presentase***
Laki-laki	34	77,3%
Perempuan	10	22,7%
Sumber: Data diolah, 2024		

4.2.2 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan responden maka responden terbanyak memiliki pendidikan S1 sebesar 23 orang atau sebesar 52,3% , diikuti responden yang berpendidikan SMA sebanyak 20 orang atau sebesar 45,5%, SMP sebanyak 1 orang atau 2,3% dan SD memiliki 0 atau dengan jumlah 0%. Sebagaimana dilihat dalam table 4.2 berikut:

Table 4.2 Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir	**Jumlah**	**Presentase**
SD	0	0%
SMP	1	2.3%
SMA	20	45,5%
S1	23	52,3%
Total	44	100%
Sumber: Data diolah, 2024		

Dengan demikian, responden yang menjadi sampel penelitian ini, sebagian besar adalah sarjana (S1).

4.2.3 Jabatan

Berdasarkan tingkat jabatan responden maka responden terbanyak ada pada jabatan Sekertaris desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 12 atau dengan presentase 27,3%, kemudian diikuti oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah masing-masing 10 atau dengan presentrase 22,7%. Sebagaimana dapat dilihat pada table 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Jabatan

Jabatan	**Jumlah**	**Presentase**
Kepala Desa	10	22,7%
Sekertaris Desa	12	27,3%
Bendahara Desa	10	22,7%
Badan Permusyawaratan Desa	12	27,3%
Total	44	100%
Sumber: Data diolah, 2024		

4.2.4 Usia Responden

Berdasarkan klasifikasi responden berdasarkan usia, usia paling banyak ada pada 26-30 than dengan jumlah 11 atau 25%, usia 20-25 denan jumlah 8 atau 18,2%, kemudian usia 57-60 sebanyak 7 atau 15,9%, 31-35 sebanyak 6 atau 13,6%, 41-45 sebanyak 4 orang atau 9%, 36-40 sebnyak 3 atau 6,8%, 51-55 sebanyak 3 atay 6,9% , 46-50 1 atau 4,5%, dan terakhir usia di atas 60 berjumlah 1 atau 2,3%. Sebagaimana dapat dilihat pada table 4.4 berikut:

Table 4.4 Usia Responden

Usia	**Jumlah**	**Presentase**
20-25	8	18,2%
26-30	11	25%
31-35	6	13,6%
36-40	3	6,9%
41-45	4	9%
46-50	1	4,5%
51-55	3	6,9%
56-60	7	15,9%
Diatas 60	1	2,3%
Total	44	100%
Sumber: Data diolah, 2024		

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu berupa kuesioner terkait kedisiplinan budaya organisasi, *lean management accounting*, dan kinerja operasional yang disebar ke karyawan PT. Sinar Surya. Sumber data berasal dari kuesioner yang telah disebar. Data yang diperoleh menggunakan *range* mulai angka 1 sampai 5 (skala likert) yang dipakai untuk mengukur atau melihat tanggapan responden terhadap persepsi mahasiswa, penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, motivasidan minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi Akuntan Publik dimana tanggapan responden atas

setiap variabel akan dimasukkan pada rentang skala. Menurut Sugiyono (2019:80), untuk menentukan panjang kelas interval menggunakan rumus.

Panjang kelas = Nilai tertinggi-Nilai terendah

Jumlah kelas

= 5-1 = 0,8

5

Hasil interval kelas diperoleh 0,8, jadi dapat disimpulkan kriteria rata-rata atas jawaban responden adalah:

Tabel 4.5 Skala *Likert*

1 < x < 1,8	: Sangat tidak setuju
1,8< x < 2,6	: Tidak setuju
2,6< x < 3,4	: Netral
3,4< x < 4,2	: Setuju
4,2< x ≤ 5	: Sangat setuju

Sumber: (Sugiyono, 2019:25)

Uji statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk merangkum, menggambarkan, dan menganalisis data secara statistik. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data yang diamati. Berikut terlampir uji statistik deskriptif.

Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif

	No.	**Missing**	**Mean**	**Median**	**Min**	**Max**	**Standard Deviation**	**Excess Kurtosis**	**Skewness**
Y1.1	1,000	0.000	4,163	4,000	1,000	5,000	0.54	6,205.00	(1,851.00)
Y1.2	2,000	0.000	4,233	4,000	2,000	5,000	0.42	3,033.00	-0.819
Y1	3,00	0.00	4,2	4,00	1,0	5,0	0.48		

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
.3	0	0	79	0	00	00		10,387.00	(2,189.00)
Y1.4	4,000	0.000	4,302	4,000	1,000	5,000	0.49	10,191.00	(2,200.00)
Y1.5	5,000	0.000	4,000	4,000	1,000	5,000	0.65	3,283.00	(1,567.00)
Y1.6	6,000	0.000	4,186	4,000	2,000	5,000	0.48	2,922.00	(1,151.00)
Y1.7	7,000	0.000	4,279	4,000	3,000	5,000	0.35	-0.509	0.29
X1.1	8,000	0.000	4,163	4,000	1,000	5,000	0.45	12,722.00	(2,333.00)
X1.2	9,000	0.000	4,209	4,000	1,000	5,000	0.46	11,468.00	(2,228.00)
X1.3	10,000	0.000	4,163	4,000	1,000	5,000	0.45	12,722.00	(2,333.00)
X1.4	11,000	0.000	4,023	4,000	1,000	5,000	0.59	3,356.00	(1,465.00)
X1.5	12,000	0.000	4,070	4,000	1,000	5,000	0.55	5,751.00	(1,893.00)

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
X1.6	13,000	0.000	4,186	4,000	3,000	5,000	0.40	-0.186	-0.046
X1.7	14,000	0.000	4,233	4,000	3,000	5,000	0.36	-0.076	0.16
X1.8	15,000	0.000	4,279	4,000	3,000	5,000	0.35	-0.509	0.29
X2.1	16,000	0.000	4,140	4,000	1,000	5,000	0.49	8,303.00	(1,883.00)
X2.2	17,000	0.000	4,023	4,000	1,000	5,000	0.51	5,696.00	(1,518.00)
X2.3	18,000	0.000	4,047	4,000	1,000	5,000	0.45	11,026.00	(2,198.00)
X2.4	19,000	0.000	4,047	4,000	2,000	5,000	0.42	2,317.00	-0.667
X2.5	20,000	0.000	3,977	4,000	1,000	5,000	0.55	7,861.00	(2,286.00)
X2.6	21,000	0.000	3,953	4,000	2,000	5,000	0.52	0.45	-0.620
X3.1	22,000	0.000	4,465	5,000	1,000	5,000	0.50	10,593.00	(2,514.00)
X3.2	23,000	0.000	4,419	4,000	2,000	5,000	0.43	3,418.00	(1,204.00)

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
X3.3	24,000	0.000	4,326	4,000	3,000	5,000	0.39	-0.608	-0.085
X3.4	25,000	0.000	4,372	4,000	4,000	5,000	0.34	(1,784.00)	0.38
X3.5	26,000	0.000	4,465	4,000	4,000	5,000	0.35	(2,078.00)	0.10
X3.6	27,000	0.000	4,372	4,000	4,000	5,000	0.34	(1,784.00)	0.38
X3.7	28,000	0.000	4,419	4,000	2,000	5,000	0.43	3,418.00	(1,204.00)
X3.8	29,000	0.000	4,372	4,000	4,000	5,000	0.34	(1,784.00)	0.38

Sumber: Smart PLS

Berdasarkan tabel yang disediakan data dikategorikan ke dalam beberapa grup, yang diberi label sebagai "Y1.1" hingga "X3.8". Setiap grup mengandung set nilai dengan statistik deskriptif yang sesuai. Ukuran tendensi tengah termasuk rata-rata, yang adalah nilai rata-rata dari data, dan median, yang adalah nilai tengah ketika data disusun dalam urutan. Minimum dan maksimum nilai mewakili nilai terendah dan tertinggi dalam set data, secara keseluruhan. Ukuran dispersi termasuk deviasi standar, yang adalah ukuran seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Kurtosis kelebihan mengukur seberapa runcing atau datar distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Skewness mengukur seberapa tidak simetris distribusi, dengan nilai positif menunjukkan distribusi yang disebelah kanan dan nilai negatif menunjukkan distribusi yang disebelah kiri.

4.4 Hasil Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk memprediksi hubungan relasional dalam model struktural, pengujian model pengukuran harus terlebih dahulu untuk verifikasi indikator dan variabel laten yang dapat diuji selanjutnya. Hasil algoritma dapat dilihat dalam bentuk data model penelitian yang menampilkan skor loading (outer loading). Dengan menggunakan Smart PLS kemudian model dieksekusi dengan menggunakan PLS Algorithm berikut adalah tampilan PLS Algorithm.

Tabel 4.7 Pengujian Outer Loading

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**Kompetensi Aparatur (X1)_**	**Partisipasi Masyarakat (X2)**	**Sistem Pengendalian Intern (X3)**
X1.1		**0,818**		
X1.2		**0,826**		
X1.3		**0,811**		
X1.4		**0,785**		
X1.5		**0,829**		
X1.6		**0,772**		
X1.7		**0,781**		
X1.8		**0,784**		
X2.1			**0,774**	
X2.2			**0,818**	
X2.3			**0,822**	
X2.4			**0,841**	
X2.5			**0,767**	
X2.6			**0,784**	
X3.1				**0,828**
X3.2				**0,811**
X3.3				**0,794**
X3.4				**0,793**
X3.5				**0,715**
X3.6				**0,784**
X3.7				**0,755**
X3.8				**0,812**

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Kompetensi Aparatur (X1)_	Partisipasi Masyarakat (X2)	Sistem Pengendalian Intern (X3)
Y1.1	**0,876**			
Y1.2	**0,744**			
Y1.3	**0,784**			
Y1.4	**0,820**			
Y1.5	**0,824**			
Y1.6	**0,775**			
Y1.7	**0,796**			

Sumber: Smart PLS

Dilihat dari hasil Pengujian Outer Loading pada tabel tersebut, memiliki nilai korelasi di atas 0,70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. Hasil output grafik SmartPLS tampak pada gambar 4.1 yang telah memenuhi convergent validity karena semua factor loading berada di atas 0,50.

4.4.1 Uji Partial Least Square

Convergent Validity dan *measurement* model dengan indikator refleksif dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan konstruknya. Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,7. Namun demikian pada riset tahappengembangan skala *loading* 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2018:40). Uji validitas menggunakan korelasi *product moment pearson* dengan tingkat sgnifikasi yang digunakan adalah 5% = 0,05. Untuk menilai *discriminant validity* yang baik adalah dengan menilai nilai *Average Variance Extracted* (AVE) masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50. Pada tabel 4.8 akan disajikan nilai AVE untuk seluruh variabel.

Tabel 4.8 Uji *Convergent Validity*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**0.909**	**0.915**	**0.646**
Kompetensi Aparatur (X1)_	**0.920**	**0.922**	**0.642**
Partisipasi Masyarakat (X2)	**0.889**	**0.894**	**0.642**
Sistem Pengendalian Intern (X3)	**0.908**	**0.955**	**0.595**

Sumber: Smart PLS

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk variabel memenuhi kriteria valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk semua konstruk variabel diatas 0,50, sebagaimana kriteria yang direkomendasikan, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini valid.

4.4.2 Outter Model

Outter model dalam Smart PLS menggunakan uji reliabilitas yang digunakan untuk menguji akurasi instrument pengukur variabel dan seberapa akurat jika dilakukan pengukuran ulang. Di samping uji validitas konstruk dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan composite reliability dari blok indikator yang mengukur konstruk. Berikut tabel 4.9 menunjukkan hasil uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 4.9 Uji *Composite Reliability*

	Cronbach's Alpha	**rho_A**	**Composite Reliability**
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**0.909**	**0.915**	**0.927**
Kompetensi Aparatur (X1)_	**0.920**	**0.922**	**0.935**
Partisipasi Masyarakat (X2)	**0.889**	**0.894**	**0.915**
Sistem Pengendalian Intern (X3)	**0.908**	**0.955**	**0.921**

Sumber: Smart PLS

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut, dapat menunjukkan bahwa konstruk variabel dinyatakan reliable jika memiliki nilai composite reliability di atas 0,70. Hasil output SmartPLS menunjukkan semua konstruk variabel memiliki nilai composite reliability di atas 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konstruk variabel memiliki reliabilitas yang baik dalam penelitian ini.

Validitas diskriminan merupakan konsep kunci dalam penelitian, khususnya dalam konteks *Structural Equation Modeling* (SEM) dan *Partial Least Squares* (PLS) SEM. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk laten dalam suatu model benar-benar berbeda dari variabel lainnya. Salah satu metode umum untuk menilai validitas diskriminan adalah kriteria Fornell-Larcker, yang membandingkan akar kuadrat dari rata-rata varians yang diekstraksi (AVE) dengan korelasi antar konstruk. Jika akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain, maka validitas diskriminan ditetapkan. Metode lainnya adalah cross-loading, yang melibatkan pemeriksaan pembebanan setiap item pada konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya. Selain itu, Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT) digunakan untuk menilai validitas diskriminan. Secara

umum, nilai validitas diskriminan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu konstruk unik dan berbeda dari konstruk lain dalam model.

Tabel 4.10 Uji Discriminant

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**Kompetensi Aparatur (X1)_**	**Partisipasi Masyarakat (X2)**	**Sistem Pengendalian Intern (X3)**
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,804			
Kompetensi Aparatur (X1)_	0,844	0,801		
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,739	0,793	0,801	
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,601	0,579	0,414	0,772

Sumber: SmartPls

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut, Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa karena nilai korelasi di luar diagonal utama (korelasi antar variabel yang berbeda) lebih kecil dibandingkan nilai korelasi pada diagonal utama (korelasi antara suatu variabel dengan variabel itu sendiri), maka diskriminannya adalah validitas yang memuaskan. Misalnya nilai korelasi antara Y dan X1 (0,804) lebih besar dari nilai korelasi Y dan X2 (0,739), dan nilai korelasi antara Y dan X1 lebih besar dari nilai korelasi Y dan X2 (0,739). Setiap variabel lebih berkorelasi dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan variabel lain dalam model, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai validitas diskriminan yang baik.

Dengan demikian, berdasarkan tabel korelasi yang tersedia, validitas diskriminan konstruksi tanggung jawab pengelolaan dana desa (Y), kapasitas kelembagaan (X1), partisipasi masyarakat (X2) dan sistem pengendalian intern (X3) terpenuhi.

Tabel 4.11 Uji *Cronbach Alpha*

	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**0,909**
Kompetensi Aparatur (X1)_	**0,920**
Partisipasi Masyarakat (X2)	**0,889**
Sistem Pengendalian Intern (X3)	**0,908**

Sumber: SmartPLs

Semua variable memiliki nilai reabilitas yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 4.9, tetapi tidak selalu nilai reabilitas dengan reabilitas komposit masing-masing lebih dari 0,7. Nilai 0,7 untuk setiap variable penelitian menunjukkan tingkat reabilitas yang tinggi, sedangkan nilai kurang dari 0,7 menunjukkan tingkat reabilitas yang rendah. Dengan memperhatikan table 4.11, reliabilitas akan dianggap tinggi jika *Cronbach Alpha* lebih dari 0,7. Dengan demikian, seluruh variable memiliki reabilitas yang dinilai tinggi.

4.4.3 Inner Model

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel. Tabel 4.12 merupakan hasil uji *R-square* dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 4.12 Uji Nilai *R-Square*

	R Square	**R Square Adjusted**
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.747	0.728

Sumber: Smart PLS

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut, tabel uji R-Square menunjukkan nilai R-Square dan R-Square Adjusted untuk setiap variabel dalam model penelitian. Nilai R-Square menunjukkan seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sementara itu, nilai R-Square Adjusted memperhitungkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang seberapa baik model tersebut cocok dengan data yang ada.

Dalam konteks penelitian ini, tabel uji R-Square menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 0,747, sedangkan nilai R-Square Adjusted-nya adalah 0,728. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 74,7% variabilitas akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Namun, nilai R-Square Adjusted memberikan penyesuaian untuk kompleksitas model, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang seberapa baik model tersebut cocok dengan data yang ada.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, penggunaan R-Square Adjusted memberikan informasi yang lebih akurat tentang seberapa baik model penelitian cocok dengan data yang ada, dan seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Hasil ini menunjukkan bahwa 74,7% variabel kompetensi aparatur (X1), partisipasi masyarakat (X2), sistem pengendalian intern (X3) mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya 25,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian

.

4.4.4 Uji Hipotesis

Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path coefficients. Tabel 4.3 memberikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis

Path Coefficients T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	**Sample Mean (M)**	**Standard Deviation (STDEV)**	**T Statistics (|O/STDEV|)**	**P Values**
Kompetensi Aparatur (X1)_ -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.571	0.553	0.180	3.170	**0.002**
Partisipasi Masyarakat (X2) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.210	0.236	0.158	1.327	**0.185**
Sistem Pengendalian Intern (X3) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.183	0.179	0.126	1.457	**0.146**

Sumber: Smart PLS

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut, Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian, hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS adalah sebagai berikut.

1. Uji Hipotesis 1 (Kompetensi Aparatur Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, terbukti berpengaruh. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa hubungan variabel kompetensi aparatur berpengaruh dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis 1 diterima.

2. Uji Hipotesis 2 (Partisipasi Masyarakat Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

   Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, terbukti tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa hubungan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,185. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis 2 ditolak.

3. Uji Hipotesis 3 (Sistem Pengendalian Intern Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

   Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, terbukti berpengaruh. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa hubungan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,146. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari

0.05. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis 3 ditolak.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis partial least square dan hasil uji-uji lainnya yang telah dilakukan. menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah cocok untuk variabel kedisiplinan budaya organisasi, dan lean management accounting terhadap kinerja operasional. Hal ini disebabkan karena tingkat kedisiplinan budaya organisasi, dan lean management accounting terhadap kinerja operasional yang masing-masing menunjukkan hasil yang beragam, sehingga mempengaruhi kenaikan maupun penurunan kinerja operasional.

4.5.1 Kompetensi Aparatur Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada P Values sebesar 0,002 < 0,05 yang berarti bahwa signikansi lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik dan besarnya kompetensi aparatur yang di dapat maka akan semakin menambah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena aparatur yang kompeten memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola dana desa dengan baik. Mereka mampu menyajikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh publik, memudahkan dalam memantau penggunaan dana, serta menuntut pertanggungjawaban jika diperlukan. Selain itu, aparatur yang kompeten dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengelolaan dana desa dengan lebih baik. Mereka juga dapat mengimplementasikan kontrol internal yang tepat

untuk mengurangi risiko terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana.

Dalam konteks desa, kompetensi aparatur sangat penting karena pengelolaan sumber daya desa memerlukan dukungan sumber daya manusia yang baik dan peralatan TI yang memadai. Dengan adanya kompetensi yang tinggi, aparatur desa dapat melakukan pengelolaan dana desa dengan baik, memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pembukuan yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan dana. Mereka juga dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran atau penyalahgunaan dana. Kemampuan manajerial yang baik juga memungkinkan aparatur untuk mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif, serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program penggunaan dana desa dengan baik, meminimalkan risiko terjadinya pemborosan atau penyalahgunaan dana. Dengan demikian, kompetensi aparatur yang tinggi akan memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di tingkat desa.

Aparatur yang kompeten cenderung lebih transparan dalam melaporkan penggunaan dana desa. Mereka mampu menyajikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh publik, sehingga memudahkan dalam memantau penggunaan dana dan menuntut pertanggungjawaban jika diperlukan. Aparatur yang kompeten dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengelolaan dana desa dengan lebih baik. Mereka dapat mengimplementasikan kontrol internal yang tepat untuk mengurangi risiko terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan Atiningsih & Ningtyas (2019) yang menemukan bahwa ada hubungan antara kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.5.2 Partisipasi Masyarakat Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada P Values sebesar 0,185 > 0,05 yang berarti bahwa signikansi lebih besar dari 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya pengawasan langsung dari warga terhadap pengelolaan dana desa. Dengan aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan program, masyarakat dapat mengetahui dengan lebih baik bagaimana dana desa digunakan dan dapat mengidentifikasi potensi ketidakberesan atau penyalahgunaan dana desa.

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan partisipasi masyarakat tidak berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa termasuk kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya yang mendasari temuan ini termasuk penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020) yang menemukan bahwa ada hubungan antara partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan temuan ini, hipotesis partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diterima.

4.5.3 Sistem Pengendalian Intern Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada P Values sebesar 0,146 > 0,05 yang berarti bahwa signikansi lebih besar dari 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SPI dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyelewengan atau penyalahgunaan dana. Dengan adanya SPI yang efektif, risiko terjadinya tindakan yang tidak sesuai atau melanggar aturan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan. SPI memberikan kerangka kerja bagi pemerintah desa atau lembaga terkait untuk mengawasi dan mengevaluasi aktivitas pengelolaan dana secara internal. Ini termasuk pemisahan tugas, verifikasi transaksi, dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. SPI membantu memastikan bahwa pelaporan keuangan dana desa dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Dengan kontrol yang ketat atas pembukuan dan pelaporan, informasi keuangan yang disajikan akan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan sistem pengendalian internal tidak berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa termasuk kurangnya implementasi yang efektif dari sistem pengendalian internal, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sistem pengendalian internal di tingkat desa, serta kurangnya sumber daya dan dukungan untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Penelitian sebelumnya yang mendasari temuan ini termasuk penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020) yang menemukan bahwa tidak ada dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh sistem pengendalian internal. Hal ini menunjukkan konsistensi dengan

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan temuan ini, hipotesis bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diterima.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Belitang Madang Raya Kab Oku Timur. Berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan dan memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Belitang Madang Raya Kab Oku Timur.

2. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Belitang Madang Raya Kab Oku Timur.

3.Sistem Pengendalian *Intern* tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di kecamatan Belitang Madang Raya Kab Oku Timur.

5.2 Saran

Saran yang dapat ditemukan dalam penelitian ini setelah melakukan analisis penelitian atas hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan yang terarah kepada aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen keuangan, administrasi, dan pengawasan. Pemerintah daerah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan program. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, forum diskusi terbuka, dan mekanisme partisipasi yang inklusif.

Pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi SPI di tingkat desa dengan menyediakan panduan praktis, bimbingan teknis, dan dukungan teknologi yang diperlukan. Selain itu, evaluasi rutin terhadap efektivitas SPI

harus dilakukan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan tindakan korektif yang diperlukan. Pemerintah daerah harus menyusun pedoman dan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait pengelolaan dana desa, termasuk standar akuntansi, prosedur pengendalian intern, dan mekanisme pelaporan. Pedoman ini harus disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

5.3.1 Keterbatasan

Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat langsung diterapkan secara luas di luar Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah lain dapat berbeda, sehingga perlu hati-hati dalam menggeneralisasi temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan mungkin memiliki keterbatasan tertentu, seperti keterbatasan dalam populasi sampel, alat ukur yang digunakan, atau penggunaan data sekunder. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Keterbatasan waktu dan anggaran mungkin membatasi ruang lingkup dan kedalaman penelitian. Hal ini dapat mengakibatkan penelitian tidak dapat menjangkau semua aspek yang relevan atau tidak dapat melakukan analisis yang lebih mendalam.

5.3.2 Implikasi Penelitian

Dari hasil analisis hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pedoman dan program pelatihan dapat disusun berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat.

Temuan penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian lebih lanjut dapat mengatasi keterbatasan penelitian ini dan

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitasnya. Program penyuluhan dan advokasi dapat diselenggarakan berdasarkan temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andreas, E. S., & Diyanto, V. (2020). The Effect of Leadership, Internal Control System, and Organizational Commitment On Accountability Of Villager Financial Management. *Journal of Applied Management (JAM)*, *18*(3).

Andriani, U., & Zulaikha, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntans*, *2*, 119–144.

Anggrayeni, S. R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, *2*(2), 179–193. https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485

Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(3), 1–20. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2829/2839

Aryani, I. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran)*. http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2087%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/2087/1/16.0102.0049_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Atiningsih, S., & Ningtyas, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Urnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, *10*(p-ISSN 2086-3748 e-ISSN 2086-3748), 2015–2019.

Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *23*(2), 145–159. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240

Fahr, A. (2008). Structural Equation. In *The International Encyclopedia of Communication*. https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbiecs108

Fatkhurrokhim. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*. *7*(3), 6.

Fitri, P. D., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *20*(4), 281–298. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331

Hariani, N. K., Merawati, L. K., & Ida Ayu Nyoman Yuliastuti. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, *6*(1), 78–99. https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765

Indraswari, nafadhila eka, & rahayu, yuliastuti. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, *10*(1), 1–10. https://doi.org/10.37478/jria.v2i1.2143

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *3*(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Ogan, B., & Ulu, K. (2021). *Bupati ogan komering ulu*. *1*.

Pahlawan, E. wahyuning, Wijayanti, A., & suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, *2*(2), 162–172.

Plumier, B. M., & Maier, D. E. (2018). Sensitivity analysis of a fumigant movement and loss model for bulk stored grain to predict effects of environmental conditions and operational variables on fumigation efficacy. *Journal of Stored Products Research*, *78*, 18–26. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2018.05.012

Saputra, A. S. (2018). Pengaruh Kompensasi dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan Dimediasi Motivasi Kerja: Studi Kasus Di Hotel Merah Group Magetan, Jawa Timur, Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*, 1–183.

temalagi, selva, & anakotta, fanny monica. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Unit: ARU Journal*, *2*(1), 51–65. https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722

Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, *4*(2), 107–118. https://doi.org/10.37478/jria.v4i2.3908

Wafirotin, khusnatul zulfa, & Septiviastuti, U. (2019). The Effect Of Transparancy, Community Participation, And Accountability On Management Of Village Funds In Ponorogo Regenci. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *14*(1), 31–44.

Zulkifli, Sandrayati, & neni ariani. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten

Muara Enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, *6*(1), 26–38.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin FBE UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 877/DEK/10/Div.URT/IV/2024
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Kecamatan Belitang Madang Raya

Assalamu alaikum wr.wb.
Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama	: Hidiah Siti Juariah
No. Mahasiswa	: 20312256
Tempat/Tanggal Lahir	: Oku Timur / 27 Agustus 2002
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang	: Sarjana
Alamat	: Ds Tulus Ayu Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belitang Madang Raya, Kab Oku Timur, Sumatera Selatan"

Dosen Pembimbing : Muamar Nur Kholid, SE.,Ak.,M.Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 April 2024
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK. 943120101

Lampiran 2. Format Kuesioner

KUISIONER PENELITIAN

PROFIL DESA DAN IDENTITAS RESPONDEN

A. PROFIL DESA

1. Asal desa :……

B. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk pengisian kuisioner

Berikan tanda pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan jawaban yang akan di berikan oleh Bapak/Ibu

1. Nama Responden :…….. (boleh inisial)
2. Jenis kelamin :
   - o Laki-Laki
   - o Perempuan
3. Tingkat Pendidikan :
   - o Sd
   - o Smp
   - o Sma
   - o S1
4. Jabatan :
   - o Kepala Desa
   - o Sekertaris Desa
   - o Bendahara Desa
   - o Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lampiran 3. Daftar Pernyataan

DAFTAR PERTANYAAN

Penelitian ini mengharapkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan memberi tanda (✓) pada kolom yang sudah tersedia dengan memilih**:**

1.STS = Sangat Tidak Setuju
2.TS = Tidak Setuju
3.KS = Kurang Setuju
4.S = Setuju
5.SS = Sangat Setuju

Bagian A: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kantor desa tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu.					
2	Kantor desa tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangam tepat waktu.					
3	Kantor desa tempat saya bekerja mrnyajikan laporan keuangan secara lengkap.					
4	Transaksi yang disajikan oleh kantor desa saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
5	Informasi yang disajikan oleh kantor desa saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material					
6	Kantor desa tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan					

	umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.					
7	Kantor desa tempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat di uji kebenarannya.					

Bagian B: Kompetensi Aparatur

No	**Pertanyaan**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Saya telah mengerti peran dan fungsi pengelolaan keuangan pemerintah desa.					
2	Saya telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi keuangan yang sesungguhnya.					
3	Saya telahbekerja sesuai pedoman mengenai proses keuangan yang ada.					
4	Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang keuangan.					
5	Saya sudah berpengalaman dibidang keuangan, sehingga dapat membantu saya mengurangi kesalahan dalam bekerja.					

6	Saya telah mendapatkan pelatihan tugas sesuai dengan fungsi keuangan yang sesungguhnya.					
7	Saya telah bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses keungan yang ada.					
8	Materi pelatihan yang saya ikuti diberikan dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan.					

Bagian C: Partisipasi Masyarakat

No	**Pertanyaan**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program penggunaan dana desa.					
2	Masyarakat terlibat secaraaktif dalam rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.					
3	Masyarakat mengusulkan rencana nggaran alternative untuk BPD terhadap rancangan anggaran desa untuk diajukan kepada					

	pemerintah desa.					
4	Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa.					
5	Masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.					
6	Masyarakat memberikam penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa.					

Bagian D: Sistem Pengendalian Internal

No	**Pertanyan**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Pmerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas.					
2	Pengeluaran uang pada pemdes selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas.					
3	Komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif.					

4	Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.					
5	Adanya kejelasan tugas dan wewenang dalam pemerintah desa.					
6	Selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil temuan/review dan saran yang diberikan oleh inspektorat.					
7	Memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi resiko pelangaran.					
8	Struktur organisasi telah menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian.					

Lampiran 4.Tabulasi Data Penelitian

Tabulasi

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
2	2	4	4	2	2	4
4	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4
5	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	5	5	4
5	5	5	5	5	4	5
4	5	5	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4
3	4	5	5	1	2	4
4	5	5	5	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	3	4	4
5	4	4	5	5	4	5
5	4	4	5	5	5	5

4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	5	5	5
1	3	1	1	1	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	4
4	4	5	4	5	4	4
4	5	5	5	4	5	5
4	4	4	4	3	4	4
5	5	4	4	4	5	4

Kompetensi Aparatur

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	4	3	4	3	5	4
4	5	5	5	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	2	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4	5	4
4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	4	5	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	2	4	4	4
4	5	5	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	3	2	3	3	4
5	4	4	5	4	5	5	5
4	4	5	5	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4

4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	5
1	1	1	1	1	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	2	4	4	4	4

Partisipasi Masyarakat

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	3
3	3	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5
5	3	5	4	1	4
4	5	4	4	4	3
4	5	4	5	5	5
5	5	4	5	4	3
5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4

5	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	4	3
1	1	1	2	1	2
4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	2
4	4	3	4	3	3
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	5
5	5	5	3	4	4
4	4	4	4	4	4

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8
4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	4
5	4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	2	4
5	5	5	5	5	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	4	5	4
5	5	5	4	5	5	4	4
5	5	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4

5	5	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
1	2	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	4	5	4	5	5	4
4	5	4	4	4	4	4	4

Lampiran 5. Klasifikasi Data

Kalsifikasi Data

1. Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	34	77,3%
Perempuan	10	22,7%
Sumber: Data diolah, 2024		

2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20-25	8	18,2%
26-30	11	25%
31-35	6	13,6%
36-40	3	6,8%
41-45	4	9%
46-50	1	4,5%
51-55	3	6,9%
56-60	7	15,9%
Diatas 60	1	2,3%
Total	44	100%

Sumber: Data diolah, 2024

3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SD	0	0%
SMP	1	2.3%
SMA	20	45,5%
S1	23	52,3%
Total	44	100%
Sumber: Data diolah, 2024		

4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Presentase
Kepala Desa	10	22,7%
Sekertaris Desa	12	27,3%
Bendahara Desa	10	22,7%
Badan Permusyawaratan Desa	12	27,3%
Total	44	100%
Sumber: Data diolah, 2024		

5. Daftar Desa Subyek Penelitian

Nama Desa	**Responden**	**Presentase**
Tugu Harum	4	4,6%
Tulus Ayu	5	9,1%
Tugu Mulyo	2	4,6%
Bangsa Negara	2	4,5%
Karang Binangun	3	6,8%
Pandan Sari 1	3	4,6%
Tanah Merah	2	4,6%
Lubuk Harjo	1	2,3%
Karang Binangun II	2	4,6%
Pelita Jaya	3	6,8%
Tebing sari Mulya	3	6,9%
Rantau Jaya	2	4,5%
Yosowinangun	4	9,1%
Jati Mulyo 1	2	4,6%
Mekar Jaya	5	11,3%
Marga Cinta	1	2,3%
Total	44	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Lampiran 6.

Analisis Data Smart PLS

1. Statistic Deskriptif

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
Y1.1	1,000	0.000	4,163	4,000	1,000	5,000	0.54	6,205.00	(1,851.00)
Y1.2	2,000	0.000	4,233	4,000	2,000	5,000	0.42	3,033.00	-0.819
Y1.3	3,000	0.000	4,279	4,000	1,000	5,000	0.48	10,387.00	(2,189.00)
Y1.4	4,000	0.000	4,302	4,000	1,000	5,000	0.49	10,191.00	(2,200.00)
Y1.5	5,000	0.000	4,000	4,000	1,000	5,000	0.65	3,283.00	(1,567.00)
Y1.6	6,000	0.000	4,186	4,000	2,000	5,000	0.48	2,922.00	(1,151.00)
Y1.7	7,000	0.000	4,279	4,000	3,000	5,000	0.35	-0.509	0.29
X1.1	8,000	0.000	4,163	4,000	1,000	5,000	0.45	12,722.00	(2,333.00)
X1.2	9,000	0.000	4,209	4,000	1,000	5,000	0.46	11,468.00	(2,228.

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
									00)
X1.3	10,000	0.000	4,163	4,000	1,000	5,000	0.45	12,722.00	(2,333.00)
X1.4	11,000	0.000	4,023	4,000	1,000	5,000	0.59	3,356.00	(1,465.00)
X1.5	12,000	0.000	4,070	4,000	1,000	5,000	0.55	5,751.00	(1,893.00)
X1.6	13,000	0.000	4,186	4,000	3,000	5,000	0.40	-0.186	-0.046
X1.7	14,000	0.000	4,233	4,000	3,000	5,000	0.36	-0.076	0.16
X1.8	15,000	0.000	4,279	4,000	3,000	5,000	0.35	-0.509	0.29
X2.1	16,000	0.000	4,140	4,000	1,000	5,000	0.49	8,303.00	(1,883.00)
X2.2	17,000	0.000	4,023	4,000	1,000	5,000	0.51	5,696.00	(1,518.00)
X2.3	18,000	0.000	4,047	4,000	1,000	5,000	0.45	11,026.00	(2,198.00)
X2.4	19,000	0.000	4,047	4,000	2,000	5,000	0.42	2,317.00	-0.667
X2	20,0	0.00	3,9	4,00	1,0	5,0	0.55		

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
.5	00	0	77	0	00	00		7,861.00	(2,286.00)
X2.6	21,000	0.000	3,953	4,000	2,000	5,000	0.52	0.45	-0.620
X3.1	22,000	0.000	4,465	5,000	1,000	5,000	0.50	10,593.00	(2,514.00)
X3.2	23,000	0.000	4,419	4,000	2,000	5,000	0.43	3,418.00	(1,204.00)
X3.3	24,000	0.000	4,326	4,000	3,000	5,000	0.39	-0.608	-0.085
X3.4	25,000	0.000	4,372	4,000	4,000	5,000	0.34	(1,784.00)	0.38
X3.5	26,000	0.000	4,465	4,000	4,000	5,000	0.35	(2,078.00)	0.10
X3.6	27,000	0.000	4,372	4,000	4,000	5,000	0.34	(1,784.00)	0.38
X3.7	28,000	0.000	4,419	4,000	2,000	5,000	0.43	3,418.00	(1,204.00)
X3.8	29,000	0.000	4,372	4,000	4,000	5,000	0.34	(1,784.00)	0.38

2. Nilai Outer Loading

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**Kompetensi Aparatur (X1)_**	**Partisipasi Masyarakat (X2)**	**Sistem Pengendalian Intern (X3)**
X1.1		**0,818**		

X1.2		**0,826**		
X1.3		**0,811**		
X1.4		**0,785**		
X1.5		**0,829**		
X1.6		**0,772**		
X1.7		**0,781**		
X1.8		**0,784**		
X2.1			**0,774**	
X2.2			**0,818**	
X2.3			**0,822**	
X2.4			**0,841**	
X2.5			**0,767**	
X2.6			**0,784**	
X3.1				**0,828**
X3.2				**0,811**
X3.3				**0,794**
X3.4				**0,793**
X3.5				**0,715**
X3.6				**0,784**
X3.7				**0,755**
X3.8				**0,812**
Y1.1	**0,876**			
Y1.2	**0,744**			
Y1.3	**0,784**			
Y1.4	**0,820**			
Y1.5	**0,824**			
Y1.6	**0,775**			
Y1.7	**0,796**			

3. Uji *Convergen validity*

	Cronbach's Alpha	**rho _A**	**Average Variance Extracted (AVE)**
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**0.909**	**0.915**	**0.646**
Kompetensi Aparatur (X1)_	**0.920**	**0.922**	**0.642**
Partisipasi Masyarakat (X2)	**0.889**	**0.894**	**0.642**

Sistem Pengendalian Intern (X3)	**0.908**	**0.955**	**0.595**

4. Uji *Composite Realibility*

	Cronbach's Alpha	**rho_A**	**Composite Reliability**
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**0,909**	**0,915**	**0,927**
Kompetensi Aparatur (X1)_	**0,920**	**0,922**	**0,935**
Partisipasi Masyarakat (X2)	**0,889**	**0,894**	**0,915**
Sistem Pengendalian Intern (X3)	**0,908**	**0,955**	**0,921**

5. Uji *Discriminant Validity*

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**Kompetensi Aparatur (X1)_**	**Partisipasi Masyarakat (X2)**	**Sistem Pengendalian Intern (X3)**
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,804			
Kompetensi Aparatur (X1)_	0,844	0,801		
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,739	0,793	0,801	
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,601	0,579	0,414	0,772

6. Uji *Cronbach Alpha*

	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	**0,909**
Kompetensi Aparatur (X1)_	**0,920**

Partisipasi Masyarakat (X2)	**0,889**
Sistem Pengendalian Intern (X3)	**0,908**

7. Uji Nilai *R-Squere*

	R Square	**R Square Adjusted**
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,747	0,728

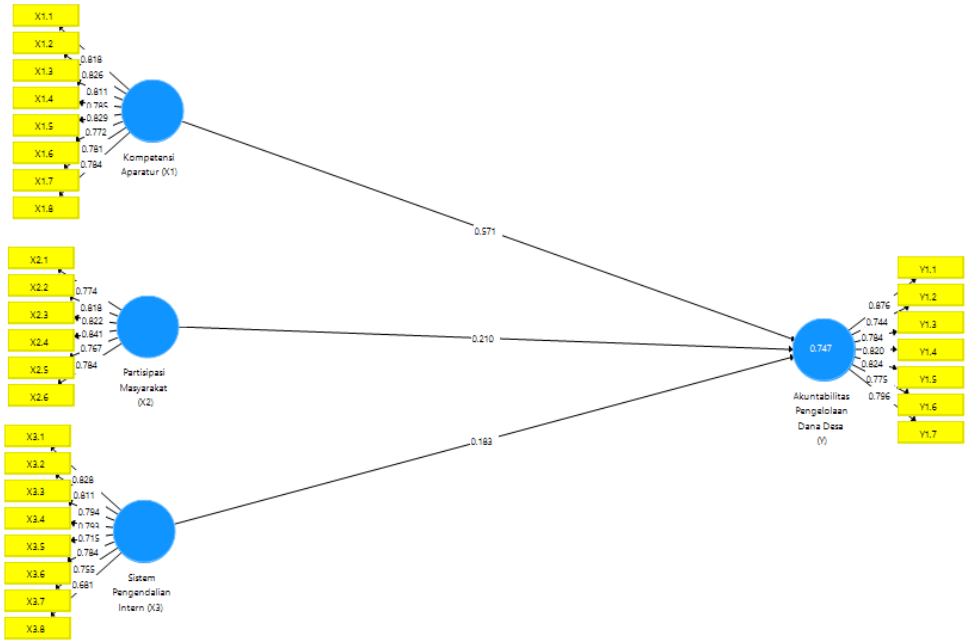
8. Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	**Sample Mean (M)**	**Standard Deviation (STDEV)**	**T Statistics (|O/STDEV|)**	**P Values**
Kompetensi Aparatur (X1)_ -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.571	0.553	0.180	3.170	**0.002**
Partisipasi Masyarakat (X2) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.210	0.236	0.158	1.327	**0.185**
Sistem Pengendalian Intern (X3) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.183	0.179	0.126	1.457	**0.146**

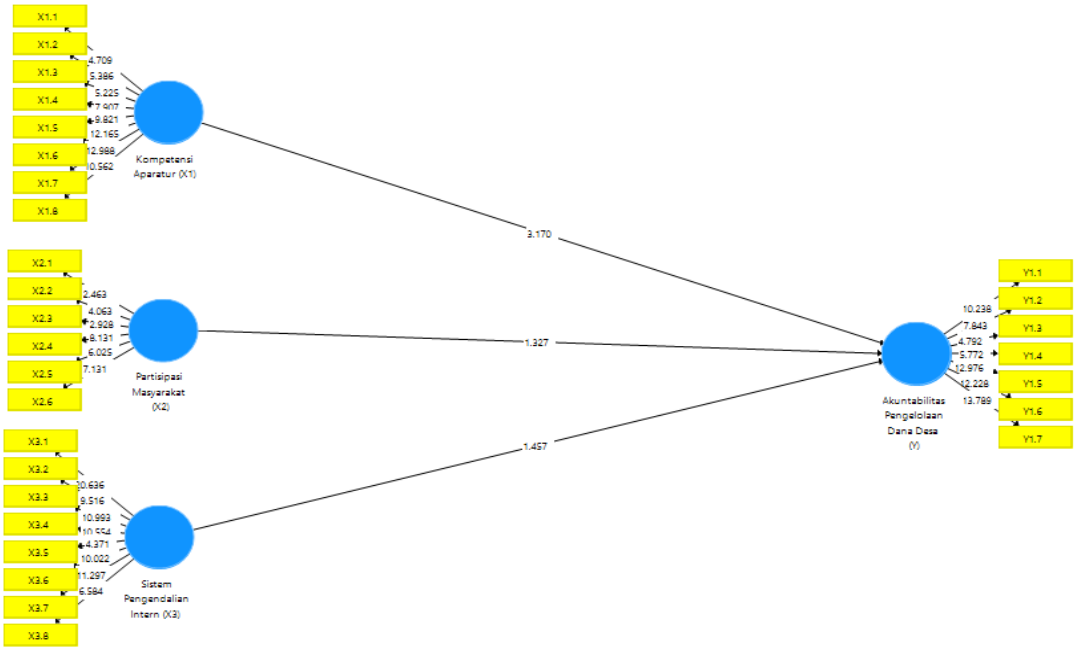
Lampiran 7. Lampiran Gambar

Daftar Gambar

1. Outer Model



2. Inner Model


X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
4.709
5.386
5.225
9.821
12.165
12.988
10.562
Kompetensi Aparatur (X1)
3.170
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
2.463
4.063
2.928
8.131
6.025
7.131
Partisipasi Masyarakat (X2)
1.327
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
X3.8
10.636
9.516
10.993
4.371
10.022
11.297
6.584
Sistem Pengendalian Intern (X3)
1.457
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
10.239
7.843
4.792
5.772
12.976
12.228
13.789
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5
Y1.6
Y1.7